

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN
E-GOVERNMENT DI DESA BARUZO KECAMATAN
IDANOGAWO KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI

OLEH :

**AMRI KRISTIAN ZAI
188510001**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN
E-GOVERNMENT DI DESA BARUZO KECAMATAN
IDANOGAWO KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area**



Oleh :

**AMRI KRISTIAN ZAI
188510001**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Desa Dalam Penerapan *E-Government* Di
Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

Nama : Amri Kristian Zai

NPM : 188510001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Beby Masitho Baubera, S. Sos, MAP

Pembimbing I

Evy Yunita Kusanti, S. Sos, M.IP

Pembimbing II



Dr. Efriati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan

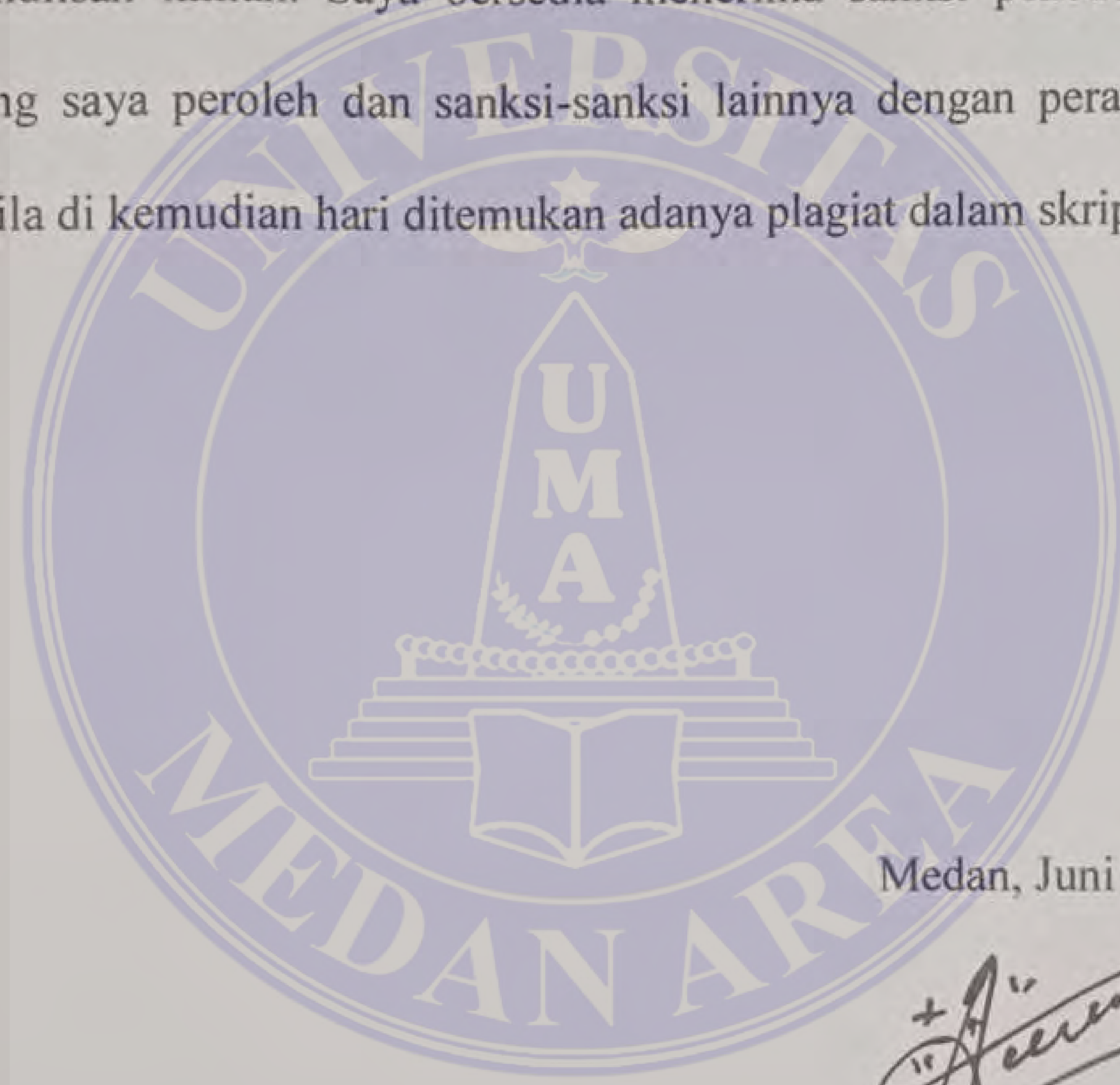
Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 21 September 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2022

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Amri Kristian Zai', is written over the bottom right portion of the watermark.

Amri Kristian Zai
188510001

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amri Kristian Zai
NPM : 188510001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

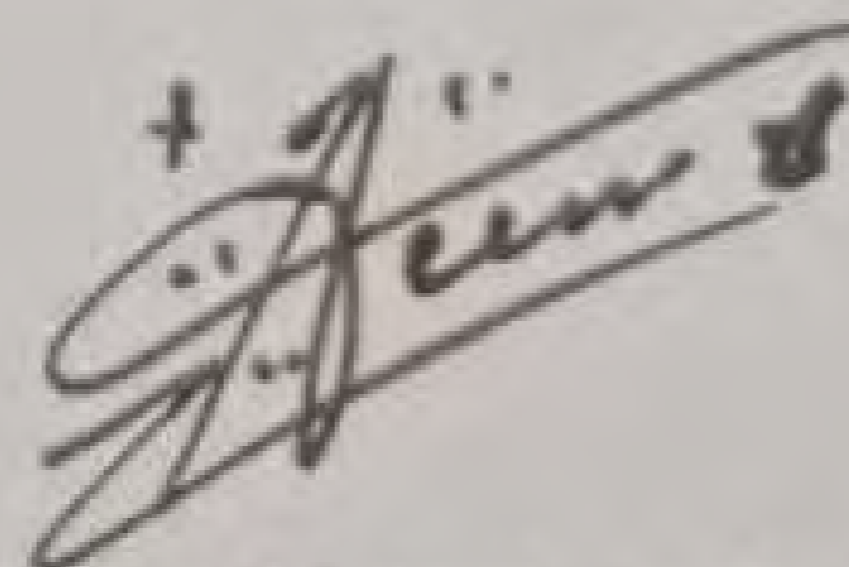
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*Non-excecutive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Strategi Pemerintah Desa Dalam Penerapan *E-Government* Di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pengolahan data (*database*), merawat dan mempublishkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 14 Juni 2022



Amri Kristian Zai

188510001

ABSTRAK

Pada era modernisasi dan globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini secara perlahan mengubah pola interaksi dan komunikasi baik antar masyarakat dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan pelaksana pelayanan publik dalam penyimpanan dan pengelolaan informasi, sehingga dalam proses pelayanan publik yang di laksanakan oleh pemerintah lebih efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Baruzo dalam penerapan *Electronic Government (e-Government)* serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Untuk mengetahui strategi penerapan *e-Government* di Desa Baruzo, peneliti menggunakan teori Sofyan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias masih belum diterapkan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Untuk mewujudkan penerapan *e-Government* di Desa Baruzo, Pemerintah Desa Baruzo mempersiapkan strategi yakni pemerataan jaringan dan pembuatan sebuah server, memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Perangkat Desa dan Aparatur Desa, mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi, memperbaiki sarana dan prasarana serta memberikan *support* terhadap para wiraswasta dan mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi semua kebutuhan dalam penerapan *e-Government*. Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Baruzo yaitu: belum kuatnya *Political Will*, belum kuatnya pemikiran strategis kepemimpinan, keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya infrastruktur.

Kata Kunci : *Strategi, e-Government*

ABSTRACT

In the era of modernization and globalization, the progress of information and communication technology is currently slowly changing the pattern of interaction and communication between the community and the government and the government with the community. Utilization of information and communication technology can facilitate the implementation of public services in storing and managing information, so that the public service process carried out by the government is more efficient, transparent, and accountable. This study aims to find out what strategies are being carried out by the Baruzo Village Government in implementing Electronic Government (e-Government) and to find out the obstacles faced by the Baruzo Village government, Idanogawo District, Nias Regency. To find out the strategy for implementing e-Government in Baruzo Village, researchers used Sofyan's theory. The type of research used is descriptive qualitative research method with collection techniques using interview techniques, literature study and documentation. The results showed that the implementation of e-Government in Baruzo Village, Idanogawo District, Nias Regency has not yet been implemented as stated in Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning National Policies and Strategies for e-Government Development. To realize the implementation of e-Government in Baruzo Village, the Baruzo Village Government has prepared strategies, namely: network distribution and the creation of a server, provide training and technical guidance to Village Apparatus and Village Apparatus, develop and improve information systems, improve facilities and infrastructure and provide support to entrepreneurs and allocate budgets used to facilitate all needs in the implementation of e-Government. And the obstacles faced by the Baruzo Village Government are: the lack of strong Political Will, the lack of strong strategic leadership thinking limited human resources and infrastructure is not yet optimal.

Keywords: *strategy, e-Government*

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 1999 dari ayah Fatisokhi Zai dan ibu Nurhayati Gulo. Penulis merupakan putra ke 2 dari 4 bersaudara.

Tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Idanogawo Kabupaten Nias dan pada tahun 2018 sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau proposal skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Penerapan *E-Government* Di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias”**.

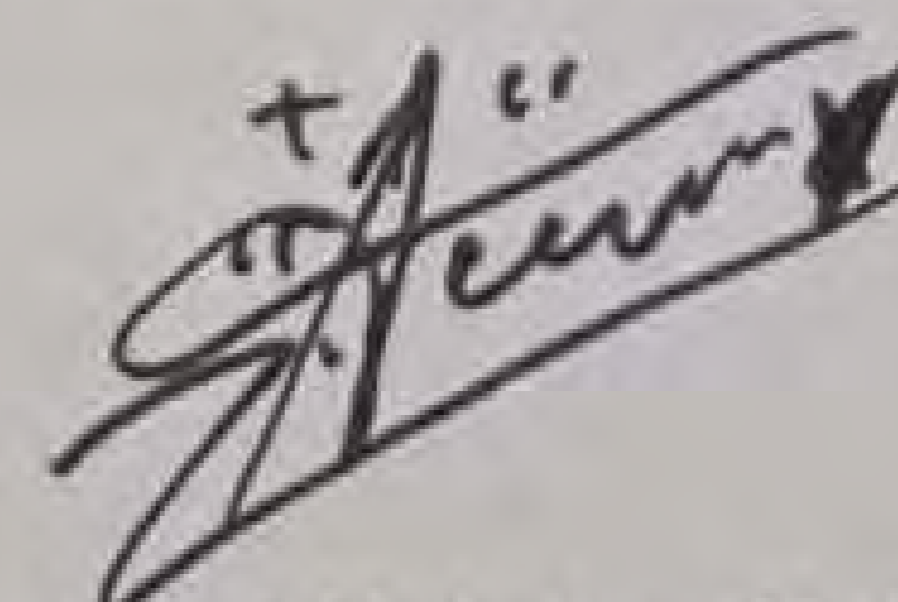
Tujuan penyusunan proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan program SI Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Saat penyusunan proposal skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan proposal skripsi. Namun berkat adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan yang diterima akhirnya semuanya dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku penanggung jawab penuh terhadap proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Medan Area.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Ibu Dr. Efati Juliana Hasibuan, M.Si selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

3. Ketua jurusan Ibu Dr. NovitaWulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S. Sos, MAP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Ibu Evy Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, MAP selaku sekretaris yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, ayah Drs, Fatisokhi Zai dan Ibu Nurhayati Gulo, abang, kakak dan adik saya, terimakasih atas cinta kasih, perhatian, pengorbanan, dukungan serta doa-doa yang tiada hentinya yang kalian berikan kepada saya.
8. Dan seluruh teman-teman stambuk 2018 prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada saya dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen baik suka dan duka kita telah jalani bersama-sama.

Medan, Juni 2022



Amri Kristian Zai
188510001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Strategi	7
2.1.1. Pengertian Strategi	7
2.1.2. Pentingnya Mempelajari Strategi	10
2.1.3. Pendekatan Dalam Menentukan Strategi	12
2.1.4. Tahap Penyusunan Strategi	12
2.1.5. Faktor Dalam Menentukan Strategi	14
2.1.6. Indikator Penyusunan Strategi	15
2.1.7. Penilaian Strategi	16
2.2. Pemerintahan Desa	17
2.3. <i>E-Government</i>	19
2.3.1. Pengertian <i>E-Government</i>	19
2.3.2. Tujuan <i>E-Government</i>	21
2.3.3. Manfaat <i>E-Government</i>	25
2.3.4. Klasifikasi <i>E-Government</i>	28
2.3.5. Indikator Suksesnya Penerapan <i>E-Government</i>	29
2.3.6. Strategi Pengembangan <i>E-Government</i>	32
2.3.7. Pelayanan <i>E-Government</i>	33
2.4. Peneliti Terdahulu	35

2.5. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.3. Informan	43
3.4. Teknik-Teknik Pengumpulan Data	43
3.4.1. Wawancara.....	43
3.4.2. Studi Pustaka.....	44
3.4.3. Dokumentasi	44
3.5. Analisis Data	45
3.5.1. Reduksi Data.....	45
3.5.2. Penyajian Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Profil Desa Baruzo	47
4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Baruzo.....	47
4.1.2. Struktur Perangkat Desa Baruzo	48
4.1.3. Visi Misi Desa Baruzo	53
4.1.4. Kondisi Geografis dan Masyarakat Desa Baruzo	55
4.2. Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Penerapan <i>E-Government</i> Di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias ..	56
4.3. Kendala Dalam Penerapan <i>E-Government</i> Di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.....	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Simpulan.....	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	42
Tabel 4.1 Kondisi Geografis dan Masyarakat Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Lembaga Pemerintahan Desa.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 4.1 Susunan Struktur Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias	48



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	73
Dokumentasi	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era modernisasi dan globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini perlahan-lahan mengubah pola interaksi dan komunikasi baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat. Perkembangan tersebut mempengaruhi segala aktivitas atau kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap masyarakat yang berhubungan dengan barang dan jasa yang telah di sediakan oleh penyelenggaran atau sering disebut sebagai pelayanan publik.

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan pelaku pelayanan publik dalam penyimpanan dan pengelolaan informasi, sehingga dalam proses pelayanan publik yang di laksanakan oleh pemerintah lebih efisien, keterbukaan, dan responsibilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan proses perubahan dalam pelayanan publik dengan menerapkan *e-Government* (elektronik pemerintah). Melalui proses ini, pemerintah dapat bekerja secara terpadu dan mandiri dengan menyediakan akses informasi dan layanan umum. Dengan begitu, lembaga-lembaga dalam negara, masyarakat, dunia pengusaha, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi layanan pemerintah secara maksimal.

Setelah diterbitkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*, hal ini menjadi bentuk nyata untuk pemerintahan Indonesia dalam menumbuhkan kualitas

pelayanan publik dengan menerapkan *e-Government*. Dengan instruksi presiden tersebut, penyelenggara pemerintah bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui intruksi presiden ini juga, pemerintah desa diharapkan dapat mengelolah pemerintahannya dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Desa dan Aparatur Desa terhadap masyarakat.

Pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah dalam lembaga negara yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Desa mempunyai peluang besar untuk mengelolah atau menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa diharapkan untuk memberikan dampak perubahan yang positif, pengelolaan pemerintahan yang lebih mandiri, dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki dapat dikelola oleh desa tersebut (Sudirman, dkk, 2021).

Desa yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik harus dapat mempersiapkan keterampilan aparatur desa dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka mewujudkan desa mandiri melalui pemanfaatan teknologi informasi. Desa diharapkan menggunakan teknologi informasi untuk membantu mereka merencanakan dan mengembangkan komunitasnya. Tujuannya adalah mewujudkan desa mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk perencanaan dan pembangunan.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Baruzo yang terletak di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Desa Baruzo adalah salah

satu desa yang berada di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Di lihat dari profil desa, Desa Baruzo adalah desa hasil pemekaran dari Desa Bobozioli Loloana'a, desa ini memiliki lahan pertanian sawah, perkebunan dan juga peternakan. Di Desa Baruzo telah banyak perkembangan dan juga kemajuan yang terjadi terutama pada infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Namun pemanfaatan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baruzo masih belum dapat di manfaatkan atau diterapkan sebagaimana Inpres No 3 Tahun 2003, sehingga pelayanan pemerintahan di Desa Baruzo kurang optimal karena masih menggunakan via WhatsApp atau metode manual.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baruzo belum mempunyai sistem yang dapat mendukung pengelolaan data. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan Perangkat Desa dan Aparatur Desa dalam bidang teknologi informasi, dimana mereka masih membutuhkan waktu yang lama (satu atau dua hari) dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan pemberitahuan informasi tersebut dilaksanakan melalui dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu, memanfaatkan setiap gereja untuk memberikan informasi dan juga dilakukan dengan cara menitipkan pesan kepada masyarakat sekitar agar dapat di sampaikan kepada masyarakat lainnya.

Dampak dari pelayanan publik secara manual terhadap masyarakat Baruzo sering mengalami keterlambatan dalam memberikan data-datanya seperti jika ada penambahan jumlah penduduk (kelahiran atau penduduk baru) dan apa bila ada pengurangan penduduk (kematian atau penduduk yang pindah). Selain itu, masyarakat juga membutuhkan waktu lama untuk

menyampaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, misalkan terjadinya kemalingan hasil karet di perkebunan masyarakat, hasil pertanian rendah dan tidak berkembang akibat lahan kering karena irigasi atau pengairan yang rusak, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa Baruzo masih menggunakan metode manual atau masih belum menerapkan *e-Government* karena terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelolah teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana seperti Gedung Balai Desa yang kecil dan ruangnya sempit, kurangnya komputer/laptop dan jaringan yang kurang merata di setiap dusun, terbatasnya kekuatan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta keterbatasan regulasi dalam implementasi sistem informasi di Desa Baruzo.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil dari pra-penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Baruzo masih belum menerapkan *e-Government* sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Penerapan *E-Government* Di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti menguraikan beberapa masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa saja strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias?
2. Apa saja yang merupakan kendala pemerintah desa dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintahan desa dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini telah tercapai, maka di harapkan dapat berguna dan bermanfaat, yakni:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baik penulis, Aparat Desa maupun masyarakat mengenai penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.
 - b. Untuk dijadikan sebagai objek pembelajaran, pedoman atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menjumpai permasalahan mengenai kendala dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

b. Bagi Instansi

Bisa dijadikan masukan untuk kedepannya, agar pemerintah desa dapat menerapkan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Menurut etimologi, strategi adalah kata dari bahasa Yunani, *stratego*, yang berarti "panglima militer" dari demokrasi Athena. Strategi sering digunakan untuk menggunakan kekuatan militer untuk memenangkan perang di dunia militer. Sedangkan istilah strategi banyak ahli memiliki pandangan dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai arti dan makna yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sofyan (2015:3) mengemukakan bahwa strategi merupakan suatu rencana kegiatan yang komprehensif yang diselenggarakan secara sistematis dan bersifat publik, karena itu dapat diketahui oleh semua orang di perusahaan maupun diluar perusahaan, akan tetapi perusahaan menerapkan strategi itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Chandler dalam Marlinda (2019) mengemukakan bahwa strategi merupakan tujuan jangka panjang dan penggunaan serta alokasi semua sumber daya yang diperlukan perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam teori ini lebih lanjut menekankan dua hal yang sangat penting dalam strategi yaitu sebagai berikut:

- a. *Distinctive Competence* (kemampuan unik), sebagai tindakan yang dijalankan oleh perusahaan/organisasi untuk menjalankan aktivitasnya lebih baik dari pesaingnya. Artinya, suatu

perusahaan/organisasi memiliki keunggulan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan/organisasi lain.

- b. *Competitive Advantage* (keunggulan bersaing), sebagai aktivitas spesifik yang dikembangkan oleh suatu perusahaan/organisasi untuk mengungguli pesaing lainnya. Keunggulan bersaing muncul ketika perusahaan/organisasi memilih strategi untuk menangkap peluang pasar.

Menurut Argyris, dkk (dalam Hutapea, 2017), mengatakan bahwa strategi adalah respon yang berkesinambungan dan penyesuaian terhadap peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan dari dalam yang berdampak pada perkembangan internal organisasi. Sedangkan menurut Wheelen dan Hunger (2012), strategi adalah seperangkat situs pengambilan keputusan manajemen, yang merupakan perilaku pengambilan keputusan jangka panjang perusahaan, termasuk analisis lingkungan eksternal dan internal, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

Berdasarkan definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara atau metode serta upaya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan terus menerus menanggapi berbagai analisis lingkungan yang eksternal dan internal, peluang untuk perumusan strategi, penerapan strategi, evaluasi dan pengendalian, dan peluang keputusan manajemen untuk menghindari dan mengatasi masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut.

Dalam menjalankan strategi ada tahapan yang harus dilakukan supaya dapat mencapai tujuan yang ingin dihendaki. Tahap strategi tersebut merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi untuk mengambil keputusan yang dibuat dan menemukan langkah yang tepat dari masalah tersebut. Sehingga strategi yang dibuat dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah yang telah terjadi dan menjadi patokan strategi yang dapat diukur dari pelaksanaannya. Ada dua tahapan strategi menurut Haryadi (2005), tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Perumusan

Perumusan strategi merupakan bagian dari langkah persiapan dimana perumusan visi dan misi dapat ditetapkan, strategi bisa dirancang dalam mencapai tujuan dan memberikan nilai pelanggan yang baik. Tahapan ini yaitu: analisis, pemilihan visi dan misi, lingkungan internal dan eksternal, tujuan strategis dan perencanaan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan strategi merupakan suatu proses kebijakan dan implementasi strategi melalui penganggaran, pengembangan struktural, implementasi dan perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan proses strategi yang paling sulit, karena yang terjadi di lapangan banyak faktor yang mempengaruhi implementasinya sehingga apa yang telah di perkiraan awal tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Keberhasilan suatu strategi tentunya harus didukung oleh pemimpin yang kebijakan, situasi dan kondisi serta budaya untuk keberhasilan, alokasi sumber daya yang memadai dan implementasi strategi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa fase strategi adalah suatu tindakan yang tepat dalam menetapkan visi dan misi, dan setelah itu diperlukan pasca implementasi lebih lanjut supaya tercapainya tujuan strategi kebijakan.

2.1.2. Pentingnya Mempelajari Strategi

Sofyan (2015:4) mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan untuk penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien dalam kondisi lingkungan yang berubah. Oleh karena itu ada, perlu dikaji teori atau konsep manajemen strategi karena ada beberapa alasan penting yaitu, sebagai berikut.

1. Kinerja mudah ditingkatkan

Saat kita mengerti arah kegiatan organisasi yang baik, maka kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Pimpinan masing-masing unit organisasi harus memiliki gambaran yang jelas tentang kegiatan bisnis organisasi dan pemahaman yang jelas tentang peran kontribusi yang diharapkan oleh perusahaan agar upaya pencapaian kinerja lebih cepat dan sederhana.

2. Pemanfaatan informasi akan semakin solid

Saat kita memahami manajemen strategi, kita mulai mengidentifikasi apa saja indikator penting yang dapat

mengarahkan perusahaan dalam mengantisipasi ataupun mengadaptasi suatu perubahan. Strategi organisasi dapat dibuat meskipun ada kemungkinan dampak perubahan yang bersifat positif ataupun negatif, dengan cara ini mendorong kita mengetahui betapa penting informasi yang aktual, lengkap, akurat dan relevan guna mendukung validitas dari keputusan penting organisasi.

3. Peranan di perusahaan akan lebih jelas

Saat kita menyadari arti dari strategi, nilai dan keyakinan serta sasaran yang diharapkan dalam kepemimpinan, sehingga akan lebih mudah dalam membuat berbagai saran untuk kepentingan kepemimpinan, dan akan memperjelas segala kegiatan yang kita perankan di dalam organisasi.

4. Korelasi kegiatan fungsi manajemen mudah dipahami

Saat kita menguasai manajemen strategi dengan baik, ini akan membuka wawasan, akan mengerti caranya optimalisasi penggunaan sumber daya organisasi membuat kita sadar bahwa tugas utama seorang pimpinan pada dasarnya adalah menjalankan fungsi manajemen yang efektif secara keseluruhan dan oleh karena itu keterkaitan antar fungsi-fungsi manajemen keseluruhannya akan dipahami dengan baik.

2.1.3. Pendekatan Dalam Menentukan Strategi

Saat mengambil keputusan strategi, menurut Sofyan (2015:7) secara umum pendekatan dalam menentukan strategi terbagi dalam tiga kategori, sebagai berikut:

- a. Analisis Rasional adalah berdasarkan pertimbangan yang logis yang didukung oleh data yang lengkap, akurat dan terkini, keputusan dibuat dengan hati-hati dengan mempertimbangkan alternatif dimana kita dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara terbaik.
- b. Bebas Intuisi, yaitu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan subyektif, keputusan yang dibuat hanya berdasarkan pada pertimbangan pribadi yang bersifat dari pengaruh pengalaman, emosi dan perasaan dari pengambil keputusan itu sendiri.
- c. Perilaku Politik, yaitu keputusan yang kadang-kala terjadi saat adanya pengaruh dari kekuatan kelompok pendukung (suara pendukung) di dalam organisasi baik yang muncul dari dalam maupun di luar organisasi.

2.1.4. Tahap Penyusunan Strategi

Dalam tahapan penyusunan strategi pada organisasi pemerintahan terdapat dua model pendekatan yakni pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*). Untuk model pendekatan *top down*, proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan lebih mengutamakan pendapat tingkat atas, kemudian turun ke tingkat bawah. Sebaliknya, untuk model pendekatan *bottom up*,

mengutamakan lapisan bawah dan menengah menjadi titik awal dari proses perumusan strategi organisasi pemerintahan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun strategi, yaitu (Nugraha, 2014:21):

1. Identifikasi masalah, sebagai tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode brainstorming atau polling pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada.
2. Pengklasifikasian masalah, pada tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.
3. Proses pengabstrakan, setelah terbentuk pengklasifikasian masalah, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah-masalah krusial dari tiap kelompok. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap masalah tersebut guna mencari faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya.
4. Penentuan metode pemecahan masalah, setelah tahap pengabstrakan selesai, hal selanjutnya yang dilakukan adalah memecahkan/menyelesaikan masalah yang telah teridentifikasi di

tahap pertama, Metode atau saran untuk memecahkan masalah spesifik dan konkret,

5. Implementasi perencanaan, tahap penyusunan strategi ini adalah langkah penting yang harus diambil untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan suatu permasalahan. Namun hal terpenting dari semua penyusunan tersebut adalah mengimplementasikan seluruh penyusunan strategi yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2.1.5. Faktor Dalam Menentukan Strategi

Dalam menentukan variabel atau faktor yang berpengaruh pada penentuan dalam pemilihan strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada dua penyebab yang dapat mempengaruhi pola penentu strategi yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, yakni: keterbatasan sumber daya dan keuangan, prioritas pemangku kepentingan (stake holder), agenda politik, tingkat dukungan publik, ketersediaan anggaran pemerintah, Perimbangan kekuatan konstituen, dan Mandat hukum.

Sementara itu, terdapat juga fakto internal yang mempunyai pengaruh pada penentu strategi, yakni: kepemimpinan organisasi, kapasitas organisasi, konsensus internal akan kebijakan yang dipilih, diskresi oleh pengendali politik, alternatif ketersediaan sumber dana, tipe kebijakan, dan perubahan teknologi pada pemberian pelayanan.

2.1.6. Indikator Penyusunan Strategi

Sofyan (2015:149), menjelaskan bahwa penerapan strategi fungsional merupakan upaya manajer fungsional untuk menyusun strategi fungsional dalam rangka melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang sangat menentukan pada umumnya manajer fungsional adalah manajer finansial, manajer produksi, manajer pemasaran dan manajer personalia dan mereka inilah yang nantinya berperan penting dalam mensukseskan perusahaan. Dalam hal ini, di pemerintahan desa juga dapat menerapkan strategi berdasarkan fungsional yang telah ditetapkan dalam pemerintahan desa, dimana Perangkat Desa dan Aparatur Desa berupaya dalam menyusun dan melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa.

Dalam menyusun strategi, Sofyan (2015:149-173) menguraikan penyusunan strategi berdasarkan fungsional, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pemasaran

Strategi ini berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan mana pun baik itu dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan desa dalam rangka untuk menyediakan pelayanan publik dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi ini merupakan suatu perencanaan untuk mempersiapkan karyawan dalam meningkatkan sikap, keterampilan dan pengetahuan di dalam organisasi. Dalam hal ini, Perangkat Desa

dan Aparatur Desa wajib menyadari bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus memerlukan adanya keterampilan dan bakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

3. Strategi Produksi

Strategi ini berhubungan dengan kegiatan yang berusaha mengadakan dan menambah nilai dari kegunaan suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, pemerintah desa berupaya dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memenuhi dan menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut dengan meningkatkan infrastruktur, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya.

4. Strategi Finansial

Strategi ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang desa No 6 tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa untuk mengelola dan mengatur desa termasuk dalam pengelolaan keuangan.

2.1.7. Penilaian Strategi

David (2011:7) mengemukakan bahwa penilaian strategi adalah tahap terakhir dari manajemen strategis. Manajer harus tahu kapan strategi tertentu tidak berhasil. Penilaian atau evaluasi strategi adalah cara utama untuk mendapatkan informasi. Semua strategi terbuka dapat dimodifikasi di masa depan karena berbagai faktor eksternal dan internal

akan terus berubah. Penilaian strategi digunakan karena ketika saat ini berhasil dan belum tentu berhasil nantinya.

Ada tiga kegiatan penilaian strategi dasar yaitu: pemeriksaan ulang faktor eksternal dan internal yang membentuk fondasi untuk strategi saat ini, pengambilan langkah korektif dan pengukuran kinerja. Penilaian suatu strategi di anggap sangat penting, karena pada dasarnya penilaian strategi ini dibuat supaya dapat diketahui strategi mana yang tidak berjalan maksimal dan mana strategi yang bahkan tidak berjalan sama sekali, yang kemudian dapat dirubah dengan mengikuti perkembangan yang terus menerus mengalami perubahan (David, 2011:7).

2.2. Pemerintahan Desa

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan dan berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya, mementingkan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa merupakan perkumpulan masyarakat dengan struktur aslinya berdasarkan hak asal usul dari masyarakat tersebut. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah demokratisasi, keberagaman, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi otonom sejati. Sebagai subsistem dari sistem manajemen pemerintahan dalam pengelolaan administrasi, pemerintahan tingkat desa

memungkinkan tingkat desa mempunyai kekuasaan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat (Widjaja 2003:3).

Dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UU peraturan No. 6 tahun 2014 tentang desa, dengan sistem pemerintahan NKRI, pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dan pemerintahan desa juga merupakan kepala desa atau dikendalikan oleh lembaga bantuan lain, sebagai komponen organisasi pemerintahan desa.

Menurut Nurcholis (2011:73), pemerintahan desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang meliputi:

- 1) Pemimpin, yaitu kepala desa.
- 2) Pembantu kepala desa, meliputi:
 - a. Sekretariat desa, yaitu staf atau aparatur pemerintahan desa, yang diketuai oleh sekretaris desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
 - b. Pelaksana teknis, yaitu yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan urusan teknis di lapangan atau melaksanakan tugas operasional seperti urusan agama dan pengairan.
 - c. Bagian kewilayahan, yaitu yang membantu kepala desa dalam wilayah kerjanya, misalnya Kadus (kepala dusun).

Gambar 2.1 Struktur Lembaga Pemerintahan Desa



Dengan struktur dan fungsi yang demikian, pemerintah desa diharapkan mampu memenuhi tugas dan kewajibannya serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ada koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Artinya semua Perangkat desa dapat saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Desa akan dikendalikan oleh instansi pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam menjalankan tugasnya.

2.3. E-Government

2.3.1. Pengertian E-Government

Bank Dunia (World Bank) dalam Indrajit (2016:2) mengemukakan bahwa *e-Government refersh to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet and mobile computing) that have ability to transforme relations with citezens, businesses and other armsi of government.* Artinya yaitu *e-Government* merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi (seperti

Wide Area Network, Internet, dan komputasi bergerak) untuk mengubah hubungan dengan warga, bisnis, dan pemerintah lainnya.

Elektonic Government (pemerintahan elektronik) atau sering disebut *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam menyediakan layanan informasi bagi warganya, urusan usaha atau bisnis, ataupun urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. *E-government* bisa diterapkan pada badan yudikatif, legislatif, atau administrasi publik dalam meningkatkan efisiensi internal, menyediakan layanan umum atau proses pemerintahan yang demokratis (Sayyidul 2019).

Zweers and Planque dalam (Aprianty 2016) mengemukakan bahwa *e-Government* mengacu pada penyediaan layanan informasi, dan produk yang disediakan oleh pemerintahan secara elektronik, tidak terlepas dari lokasi dan waktu, memberikan nilai unggul terhadap partisipasi dari semua lapisan masyarakat.

Dari beberapa defenisi yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan bahwa *e-Government* adalah pemakaian dan pendayagunaan teknologi informasi yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih responsif dan efisien serta menyediakan akses informasi dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

2.3.2. Tujuan *E-Government*

Indrajit (2016:139) mengungkapkan bahwa tujuan dari penerapan *e-Government* yaitu untuk meningkatkan akses dan layanan yang dilakukan warga masyarakat terhadap layanan publik pemerintah, meningkatkan akses publik terhadap sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah, dan menangani pengaduan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*, ada empat tujuan untuk mencapai penerapan *e-Government* yaitu, sebagai berikut:

1. Dengan harga yang terjangkau, untuk membangun transaksi dan jaringan informasi pelayanan publik tidak dibatasi oleh waktu, serta kualitas dan cakupan pelayanannya dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dan seluruh wilayah setiap saat.
2. Menjalin ikatan interaktif pada dunia usaha, meningkatkan tingkat pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kemampuan merespon jika terjadi perubahan dan meningkatkan persaingan perdagangan internasional.
3. Membangun komunikasi dan mekanisme dengan lembaga-lembaga nasional untuk memfasilitasi dialog terbuka dengan publik dan memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam perumusan kebijakan nasional.

4. Membangun sistem kerja yang transparan dan sistem manajemen efisien, nyaman untuk bertransaksi dan layanan antara pemerintah daerah otonom dan lembaga pemerintah.

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penerapan *e-Government* (Batini et al, 2009), yaitu:

- a. Menyediakan efisiensi dan efektivitas proses administrasi dalam penggunaan sumber data dan pencapaian hasil akhir pemerintah untuk melayani masyarakat/bisnis.
- b. Transparansi lembaga pemerintah dan administrasi publik, misalnya warga/perusahaan memiliki akses ke semua jenis informasi dan pengetahuan yang dihasilkan lembaga untuk data publik.
- c. Mencapai kesetaraan dengan mengatasi kesenjangan digital menciptakan hak bagi setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, budaya, bahasa, status ekonomi dan fisik, untuk mengakses dan memanfaatkan layanan *e-government*.

Penerapan *e-Government* memiliki beberapa tujuan di dalamnya (Pranalia, 2015), yaitu:

- a. Mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan publik.
- b. Mempermudah pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Tersedia sistem jaringan dengan internet yang memudahkan pemerintah untuk saling berhubungan, seperti ke sesama instansi pemerintah, pemerintah dengan swasta, dan kepada masyarakat.

untuk berkomunikasi dengan dua arah untuk peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- d. Penerapan *e-Government* dengan menggunakan aplikasi sistem informasi atau sistem pengolahan data yang memudahkan untuk penyebarluasan informasi secara transparan kepada publik.
- e. Otomatisasi pekerjaan kantor dan aplikasi pelayanan publik yang terselenggara untuk memberikan kemudahan akses bagi pihak yang membutuhkan

Sutabri (2013) mengatakan, tujuan *e-Government* yaitu untuk memperoleh tata pemerintahan yang baik menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Partisipasi

Partisipasi adalah kebebasan berkumpul dan mengungkapkan hak / suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi semua pria maupun wanita.

- b. Supremasi Hukum

Kondisi hukum yang adil dan ditetapkan tanpa memandang lagi, terutama hukum yang bersangkutan tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

- c. Transparansi

Transparansi merupakan unsur yang diwujudkan berdasarkan keberadaan informasi yang bebas.

d. **Membangun Konsensus**

Terbangunnya konsensus yang menyeluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok masyarakat untuk penjembutan kepentingan yang berbeda bagi tata pemerintahan yang baik.

e. **Respon cepat**

Instansi dan semua prosedur di dalamnya harus mencoba memberikan pelayanan kepada semua pihak yang terlibat.

f. **Kesejajaran**

Seluruh warga baik pria atau wanita memiliki kesempatan untuk mengubah atau membela ketentraman mereka.

g. **Efektif dan Efisien**

Proses yang ada di lembaga pemerintahan yang mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber data yang ada dengan optimal.

h. **Visi Strategis**

Pemimpin dan orang-orang dengan pandangan yang luas dan jauh ke masa depan untuk pemerintahan yang baik dan pembangunan serta apa yang diperlukan untuk mencapai perkembangan tersebut,

i. **Bertanggung Jawab**

Pihak yang melakukan pengambilan keputusan yang ada di pemerintahan yang bertanggung jawab kepada bentuk yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan jenis organisasi.

2.3.3. Manfaat *E-Government*

Dalam menerapkan *e-Government* sudah dipastikan akan memberikan dampak yang baik kepada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan juga pada pelayanan terhadap masyarakat. Berikut manfaat *e-Government* menurut Hiblunodin (2017:141-142) yaitu ;

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholders (terhadap masyarakat, dunia usaha maupun industri) dalam mencapai efektivitas dan efisiensi.
- 2) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta control dalam mengelolah pemerintahan.
- 3) Secara signifikan mengurangi biaya administrasi, relasional dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk kebutuhan sehari-hari.
- 4) Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat dengan cepat dan tepat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh berbagai perubahan dan tren global.
- 5) Memberikan kesempatan kepada pemerintah melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 6) Pemerataan dan pemberdayaan demokrasi masyarakat dan pihak lain dalam pengembangan berbagai kebijakan publik.

Terdapat tiga kategori manfaat *e-Government* menurut Sami et al (2012) dalam Rahayu, dkk (2020:248), manfaat tersebut yaitu:

1) Untuk Pemerintah

- a. Memberdayakan setiap pegawai pemerintah yang didukung oleh sarana informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi koordinasi antar instansi pemerintah dan meningkatkan transparansi dan persaingan terutama dalam pengadaan publik.
- b. Memperkuat pemantauan aktivitas warga dan menggunakan fasilitas untuk mencegah kejahatan digital.
- c. Mengintegrasikan daerah dan warganya yang terpinggirkan dalam kerangka alokasi sumber daya pemerataan, untuk mempromosikan desentralisasi yang efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan dan implementasi program dan mengubah layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam biaya dan berorientasi pada warga.
- d. Untuk mendukung pemerintah dengan menyediakan setiap layanan yang semakin berkualitas dan akuntabel.

2) Untuk Warga Masyarakat

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan warga masyarakat tentang pemerintahan.
- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif yang memberikan kesempatan yang baik untuk warga masyarakat dengan

berpartisipasi aktif dalam kehidupan global saat ini, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

- c. Meningkatkan akses layanan kepada warga negara sehingga mereka dapat menikmati hak yang sama mengakses layanan pemerintah.
- d. Memfasilitasi segala kebutuhan yang digunakan dan diperlukan oleh warga masyarakat sehingga lebih cepat dan sederhana serta efektif dan efisien.

3) Untuk Entitas Bisnis

- a. Memperkuat industri yang berskala besar dan tradisional, seperti di bidang pariwisata, pertanian, dan sandang sehingga terjadi peningkatan nilai tambah produk dan penetrasi perluas kepasar baru melalui saluran penjualan berbasis internet.
- b. Mengurangi biaya transaksi dalam aktivitas bisnis.
- c. Menjadikan perusahaan komersial lebih kompetitif dan menarik bagi investor terutama dari luar daerah.
- d. Mengembangkan penjualan yang lebih modern yang secara signifikan mengurangi biaya bagi pihak importif dan eksportif.
- e. Menciptakan lingkungan yang komunikatif yang menawarkan peluang besar bagi para pembisnis untuk bergerak di bidang elektronik.

2.3.4. Klasifikasi *E-Government*

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan *Electronic Government (e-Government)* akan menghasilkan empat hubungan baru yaitu (Oktavya 2015):

1) *Government to Citizens (G-to-C)*

Jenis *G-to-C* ini adalah aplikasi *e-Government* yang sering digunakan oleh seluruh warga negara dimana pemerintah membangun dan mengimplementasikan berbagai kombinasi teknologi informasi dengan tujuan utama meningkatkan hubungan masyarakat (*people*). Melalui berbagai jalur akses, jarak antara pemerintah dan masyarakat dapat dipersingkat, sehingga masyarakat dengan cepat menghubungi pemerintah dan memenuhi berbagai kebutuhan layanan sehari-hari.

2) *Government to Business (G-to-B)*

Salah satu tugas terpenting pemerintah yaitu menciptakan lingkungan bisnis yang ramah sehingga roda perekonomian mampu berfungsi dengan baik. Dalam menjalankan aktivitasnya, entitas komersial seperti perusahaan yang bukan milik negara (*swasta*) membutuhkan sejumlah besar informasi dan data yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, yang berkepentingan dapat berinteraksi dengan berbagai lembaga negara karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasi sebagai motif mencari keuntungan. Pemerintah dan dunia perusahaan perlu membangun hubungan yang baik, bukan hanya untuk memudahkan pelaku usaha untuk menavigasi jalannya perusahaan, tetapi

ada banyak hal yang bisa diuntungkan oleh pemerintah jika terjadi hubungan yang baik dan efektif dengan pihak industri swasta.

3) *Government to Governments (G-to-G)*

Pada era globalisasi saat ini, jelas terlihat bahwa pertukaran antar negara semakin dekat. Interaksi sehari-hari antara pemerintah suatu negara dan pemerintah bukan hanya berkisar dengan hal-hal diplomatik, namun membina hubungan antar negara dan antar entitas negara (masyarakat, industri, perusahaan, dll), proses politik, manajemen perdagangan, budaya, dan mekanisme hubungan sosial.

4) *Government to Emploeyss (G-to-E)*

Terakhir, aplikasi *e-Government* ini dirancang guna dalam meningkatkan manfaat dan kinerja pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil di berbagai instansi.

2.3.5. Indikator Suksesnya Penerapan *E-Government*

Dalam hasil pengamatan dan penelitian dari *Harvard JFK School of Government*, dalam menerapkan konsep digitalisasi di sektor publik, ada tiga indikator keberhasilan yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan benar. Indikator keberhasilan yang dimaksud dapat uraikan sebagai berikut (Indrajit 2016:10-12):

1) *Support* (pendukung)

Indikator pendukung merupakan elemen terpenting dan harus diperoleh oleh pemerintah untuk proses pengembangan *e-Government* yang sesuai dengan kehendak (*political will*) berbagai

pejabat publik dan politik. Hanya dengan demikian konsep e-government dapat diterapkan, tanpa unsur-unsur tersebut, pengembangan dan pengembangan berbagai inisiatif e-Government tidak dapat dilaksanakan.

2) *Capacity* (kapasitas)

Indikator kapasitas merupakan unsur kapabilitas atau kewenangan pemerintah daerah untuk mewujudkan impian *e-Government*. Pemerintah harus memiliki tiga sumber daya, sebagai berikut:

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk implementasi e-government sesuai dengan prinsip manfaat yang diharapkan.
- b. Tersedianya sumber daya keuangan yang cukup untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif *e-Government*.
- c. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi 50% penting untuk keberhasilan implementasi e-government karena fasilitas yang memadai.

3) *Value* (manfaat)

Indikator manfaat sebagai dasar dari keberadaan *e-Government*, dimana pemerintah berperan sebagai penyedia layanan dan masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai penerima layanan *e-Government*. Dalam indikator ini yang menentukan besarnya pengaruh manfaat *e-Government* yaitu masyarakat yang menerima layanan tersebut.

Nograsek (2011) dalam Rahayu, dkk (2020:246), mengungkapkan bahwa dalam penerapan *e-Government* ada lima elemen yang perlu dikelola, elemen yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. *Technology*, terkait dengan infrastruktur informasi nasional, infrastruktur jaringan dan basis data jaringan, kemampuan sistem atau *software* komputer untuk menukar dan memanfaatkan informasi standard data yang sesuai, standard teknis yang sepadan, model keamanan, imlementasi dukungan diskusi, multimedia, otomatisasi, pelacakan, penelusuran, dan teknologi identifikasi pribadi.
2. *Processes*, terkait dengan perubahan keseluruhan proses, mempercepat proses pelaksanaan secara signifikan seperti proses yang bisa dijalankan selama 24 jam setiap hari, integrasi antar fungsi dan departemen dan integrasi antar organisasi, perubahan aturan yang menentukan proses.
3. *People*, terkait dengan pelatihan staf yang harus diatur, pembelajaran kolektif harus dilakukan dan didorong, pemimpin harus dapat menggabungkan pengetahuan dan keterampilan TIK dari para staf dengan pemahaman tentang proses kerja, pemimin harus mampu mengembangkan visi strategis dan komprehensif dari manajemen sumber daya manusia, manajemen proyek dan strategis untuk pengguna.
4. *Organizational Culture*, terkait degan transisi kepada budaya yang berorientasi layanan, loyalitas omansasi harus diperkuat, karyawan harus didorong untuk melakukan tugas yang lebih menantang dan

bersedia mengambil tanggung jawab, kerja sama dan kepercayaan antardepartemen dan antarorganisasi harus diperkuat, pemahaman tentang pembelajaran organisasi harus diperkuat dan cara berpikir para pemimpin harus diubah secara signifikan.

5. *Structure*, terkait dengan digitalisasi data yang harus memiliki standar, stuktur hierarkis ditransformasikan menjadi suatu jaringan yang satu kesatuan.

2.3.6. Strategi Pengembangan *E-Government*

Perkembangan *e-Government* di Indonesia telah tertuang dalam Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan *e-Government*; ada beberapa strategi pokok pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut (Indrajit 2016:139);

1. Mengembangkan SDM dalam pemerintah dan meningkatkan *e-literacy* masyarakat;
2. Membangun sistem pelayanan yang kredibel dan terpercaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas;
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;
4. Mengkoordinasikan penetapan sistem manajemen dan alur kerja pemerintah pusat maupun daerah;
5. Melaksanakan pembangunan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur;
6. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dengan pertimbangan, sebagai berikut (Risnandar 2014) :

- 1) Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang cepat serta potensi pemanfaatannya secara luas, menciptakan peluang untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi dalam volume besar dengan cepat dan akurat;
- 2) Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan;
- 3) Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan efektif dan efisien diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*;
- 4) Mengingat implementasinya membutuhkan konsensus, tindakan simultan dan langkah-langkah komprehensif dari semua elemen lembaga pemerintah, sehingga dibutuhkan instruksi presiden untuk menerapkan kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government* di seluruh negeri.

2.3.7. Pelayanan *E-Government*

Setiap manusia menurut Sinambela (dalam Agus, 2017:106) memerlukan pelayanan, secara ekseseif dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak terpisahkan dengan aktivitas dari kehidupan manusia, dimana pelayanan telah melekat dalam kehidupani sehari-hari setiap manusia.

Untuk mengkategorikan jenis pelayanan salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melihat dua prospek utama, sebagai berikut:

- 1) Dari segi kompleksitas, dari segi seberapa kompleks anatomi aplikasi *e-Government (Electronic Government)* yang akan dibangun dan diimplementasikan; dan
- 2) Dari segi pemanfaatan, berkaitan dengan masalah besar kecilnya manfaat yang dirasakan oleh pengguna.

Berdasarkan dua aspek di atas, Indrajit (2006:29) dalam Oktavya (2015) ia mengatakan jenis-jenis *e-Government* dapat dibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

a. Publikasi

Komunikasi dengan satu arah di mana pemerintah mempublikasikan segala macam informasi dan data yang dipunyainya sehingga publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengaksesnya dengan segera, langsung, dan bebas melalui Internet.

b. Interaksi

Pada jenis ini terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ada dua macam aplikasi yang biasanya digunakan. Pertama, berbentuk portal yang situs terkait untuk menyediakan alat pencarian untuk mereka yang hendak mencari data atau informasi tertentu. Kedua, tersedianya saluran yang telah disediakan pemerintah untuk

kebutuhan publik baik langsung ataupun tidak langsung yang terlibat dalam diskusi dengan unit-unit kepentingan tertentu.

c. Transaksi

Pada jenis ini hampir sama seperti jenis Interaksi yaitu interaksi dua arah, namun yang membedakannya jenis ini terdapat transaksi yang berkaitan dengan transfer dana dari satu orang ke orang lain. Aplikasi ini tidak semudah seperti jenis yang lain karena harus ada sistem keamanan yang baik untuk mengirim uang dengan aman dan melindungi privasi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

2.4. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Risnandar (2014)	Analisis <i>e-Government</i> dalam peningkatan pelayanan publik pada dinas komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi	Implementasi <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti pengembangan permóдалan dan konten serta konektivitas, berjalan dengan baik, namun masih perlu perbaikan.

		Tengah.	
2.	Ayu Aditya Oktavya (2015)	Penerapan (<i>Electronic Government</i>) e- <i>Government</i> pada kantor pelayanan pajak Pratama dalam pemberian pelayanan di kantor Bontang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan e-government). 2. Penyiapan SDM yang kurang memadai, seperti penempatan jabatan yang tidak memenuhi standar pendidikan dan profesi serta jabatan konsol operator yang hanya ditangani oleh satu orang pegawai. 3. Dalam bentuk dukungan anggaran, tidak menjadi prioritas utama pengembangan e-government (e-gov). 4. Sarana prasarana pegawai KPP khususnya bagian pengolahan data dan informasi sudah memadai, namun sarana prasarana untuk masyarakat masih kurang karena hanya ada satu unit komputer.
3.	Yana Suharyana	Implementasi e- <i>Government</i>	pelayanan publik di pemerintahan Provinsi Banten menggunakan situs

	(2017)	untuk pelayanan publik di Provinsi Banten	bantenprov.go.id, namun masih banyak hal yang harus diperbaharui sesuai amanat Inpres No. 3 tahun 2003, dimana pengelolaan sistem informasi yang dibutuhkan masyarakat namun masih belum tersedia di dalam sistem tersebut.
4.	Diah Rachma Aprianty (2016)	Penerapan <i>e-Government</i> dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.	Penerapan kebijakan <i>e-Government</i> Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sudah mulai terlihat perubahan kualitas pelayanan, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, dan kepemimpinan Komunikasi yang buruk dengan karyawan.
5.	Sabino Mariano (2019)	Penerapan <i>e-Government</i> dalam pelayanan publik di	Penerapan <i>e-Government</i> Kabupaten Sidoarjo belum optimal dari segi dukungan, kemampuan dan manfaat (<i>Value</i>).

		Kabupaten Sidoarjo	
--	--	-----------------------	--

Dari beberapa penelitian diatas membuktikan bahwa penerapan dan penggunaan *e-Government* dalam pelayanan publik masih belum di implementasikan sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*.

Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Tempat penelitian ini di laksanakan tepatnya di kantor Desa Baruzo,
- 2) Penelitian ini baru pertama kali dilakukan di Desa Baruzo yang artinya belum pernah ada penelitian sebelumnya, dan
- 3) Permasalahan yang terjadi, di mana aparat desa masih belum menerapkan sama sekali *e-Government* di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baruzo.

2.5. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan kerangka berpikir yang dirancang untuk memfasilitasi penelitian oleh peneliti. Dengan kerangka berpikir ini, menjadi lebih jelas ke mana tujuan yang akan dicapai oleh para peneliti. Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2017:60), Kerangka berpikir adalah konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting.

Kerangka berpikir penelitian ini yaitu untuk menggambarkan Pemerintah Desa Baruzo sebagai tingkat pemerintahan terendah dalam lembaga negara, seperti yang diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa,

Pemerintah Desa Baruzo diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Baruzo melalui Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator dalam menyusun strategi penerapan *e-Government* di Desa Baruzo menggunakan teori Sofyan (2015), ada empat penyusunan strategi dalam penerapan *e-Government*, yaitu: 1) strategi pemasaran; 2) strategi Sumber Daya Manusia (SDM); 3) strategi produksi dan 4) strategi finansial.

Pelayanan publik pada pemerintahan Desa Baruzo kurang optimal karena keterbatasan kemampuan Perangkat Desa dan Aparatur Desa di bidang teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana yaitu Gedung Balai Desa yang kecil dan ruangnya sempit, kurangnya komputer/laptop dan jaringan yang kurang merata di setiap dusun, dan keterbatasan kemampuan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta keterbatasan regulasi dalam penyelenggaraan sistem Informasi di Desa Baruzo, sehingga dengan hal itu pelayanan yang dilakukan saat ini masih menggunakan via WhatsApp atau metode manual.

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Baruzo, peneliti mengharapkan Pemerintah Desa Baruzo ke depannya dapat menerapkan *e-Government* dalam pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan akses warga desa terhadap layanan publik dan sumber daya informasi yang dimiliki pemerintah Desa Baruzo, menangani pengaduan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Baruzo.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dalam Meleong (2007:4) penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari individu-individu dan gerak-gerik yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2014:9) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sewajarnya, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan contoh sumber data dijalankan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengolahan data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari segi generalisasi.

Dengan demikian, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan memberikan gambaran dan juga penjelasan tentang penggunaan teknologi dalam Pemerintahan Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo kabupaten Nias.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada bulan Maret 2022, di lokasi Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias khususnya dalam lingkungan Kantor Desa.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2021		2022									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	
1.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal	■	■										
2.	Seminar Proposal			■									
3.	Perbaikan Proposal				■								
4	Penelitian					■	■						
5.	Penyusunan Skripsi							■					
5.	Seminar Hasil								■				
6.	Perbaikan Skripsi									■			
7.	Pengajuan Sidang Meja Hijau										■		
8	Sidang Meja Hijau											■	

3.3. Informan

Menurut Amiruddin (2012:56) sumber data merupakan lokasi di mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Informan yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu ASN dan pegawai yang menanggapi langsung dalam penentuan jumlah informan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung serta mempunyai berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan yang merupakan informan kunci untuk penelitian ini adalah Kepala Desa (Bpk. Yabatulo Gulo).
2. Informan utama, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam hubungan sosial yang diteliti. Dan yang merupakan informan utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa (Bpk. Arofaosi Zai), Kepala Urusan (Bpk. Deli Zai S.Pd, Ibu. Ratna Suriati Gori, S.Pd, dan Bpk. Arisama Zai), Kepala Seksi (Bpk. Faoatulo Zai dan Bpk. Serius Zai) dan Kepala Dusun (Bpk. Bezisokhi Zai, Bpk. Yaatulo Hura dan Bpk. Sokhizanolo Halawa).
3. Informan tambahan/responden, yaitu orang-orang yang bersedia memberikan informasi di dalam penelitian ini. Dan yang merupakan informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Baruzo (Bpk. Talizaro Waruwu dan Ibu Desi Zebua).

3.4. Teknik-Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara

Secara umum wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka

antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, digunakan atau tidaknya pedoman wawancara, dan kehidupan sosial pewawancara dan orang yang diwawancarai, informan relatif lebih lama (Bungin, 2012:111). Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana peneliti sebagai alat utama, dan akan mewawancarai pegawai Kantor Desa Baruzo.

3.4.2. Studi Pustaka

Pada penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari teori Indrajit (2016) tentang strategi pemerintah dalam penerapan *e-Government* dan faktor suksesnya penerapan *e-Government* dan juga melihat secara langsung yang terjadi lapangan, buku-buku, jurnal, dokumentasi resmi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.4.3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kantor Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo kabupaten Nias dengan menggunakan dokumentasi berbentuk tulisan dan gambar. Sebagaimana dokumentasi menurut Sugiyono (2017:240) merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah diteliti. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.5. Analisis Data

Sugiyono (2016:335) mengungkapkan analisis data merupakan proses mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengklasifikasikannya, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih objek yang akan diteliti, dan menarik kesimpulan, sehingga dapat dipahami oleh diri mereka sendiri dan orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika responden tidak puas dengan tanggapan setelah analisis, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, dan memperoleh data yang dianggap kredibel.

Berikut langkah-langkah setelah melakukan pengumpulan analisis data:

3.5.1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan menemukannya pada saat dibutuhkan.

3.5.2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan

lainnya. Namun, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menunjukkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dipelajari.

Tahap ini merupakan tahap akhir, sebagai hasil temuan penelitian dari analisis data yang telah dilakukan, yang akan menjadi hasil rumusan pertanyaan dan jawaban atas tujuan penelitian yang dilakukan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan pemerintahan desa dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan peneliti, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*, Pemerintah Desa Baruzo kedepannya akan berusaha menjalankan dan melaksanakan strategi yang digunakan dalam penerapan *e-Government*, hal ini dapat dilihat dari indikator penyusunan strategi menurut Sofyan yakni strategi pemasaran, SDM, produksi dan finansial. Strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Baruzo dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo yaitu: a) pemerataan jaringan dan pembuatan subuah server seperti portal; b) memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Perangkat Desa dan Aparatur Desa; c) mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi, memperbaiki sarana dan prasarana serta memberikan *support* terhadap para wiraswasta dalam penggunaan elektronik dalam mengembangkan usahanya dan d) mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi semua kebutuhan dalam penerapan *e-Government*, mulai dari sumber daya manusia, penyediaan sarana dan

prasarana, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo.

2. Penerapan *e-Government* di Desa Baruzo belum dapat di implementasikan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003, karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Baruzo. Kendala-kendala tersebut ada empat yaitu 1) belum kuatnya *Political Will*; 2) belum kuatnya pemikiran strategis kepemimpinan; 3) keterbatasan sumber daya manusia; dan 4) belum optimalnya infrastruktur.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan pemerintahan desa dalam penerapan *e-Government* di Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, peneliti memberikan saran kepada Pemerintahan Desa Baruzo sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Baruzo sebaiknya secepat mungkin malakukan pelatihan dan bimbingan di bidang teknologi, sehingga seluruh Perangkat Desa dan Aparatur Desa dapat dengan mudah mengelola teknologi berbasis *e-Government* dan pelayanan publik di Desa Baruzo semakin efektif dan efisien.
2. Pemerintah Desa Baruzo sebaiknya dapat meningkatkan infrastruktur seperti pemerataan jaringan di dusun 3, WiFi dan penambahan komputer/laptop di kantor Desa Baruzo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- David, Fred R. (2011). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hiblunudin, Agus. (2017). *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Indrajit, Richardus Eko. (2016). *Electronic Government*. Yogyakarta: Preinexus.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Qudrat. (2014). *Manajemen Strategis Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT. Gelora Aksara Pratama: Erlangga.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2002) *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyan, Iban. (2015). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Pres.
- Widjaja, Haw. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589-1602.
- Dahlan, I.W., Parawangi A., and Muhiddin A. (2012). Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 43-57.
- Mariano, S. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang. *E-Journal Ilmu Pemerintahan.FISIP, Unmul*, 3(3), 1443-1447.
- Risnandar. (2014). Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Journal Katalogis*, 2(7), 192-199.
- Sudirman, D., Ibrahim, M., and Efrina. (2021). Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bina Baru Kecamatan Kulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA*, 9(2), 73-74.
- Suharyana, Y. (2017). Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 45-58.
- Sujani, M. R. (2019). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungcing Kabupaten Ciamis. *Monderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, 5(4), 483-497.

Dokumen

- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan-informan yang bersangkutan di dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi geografis serta masyarakat Desa Baruzo ?
2. Bagaimana pelayanan masyarakat di Desa Baruzo ?
3. Apakah dalam pelayanan publik di Desa Baruzo telah menerapkan *e-Government* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Baruzo dalam penerapan *e-Government* ?
5. Apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa Baruzo sehingga penerapan *e-Government* di Desa Baruzo tidak terimplementasikan?

Dokumentasi

**PROFIL DESA BARUZO
KECAMATAN IDANOGAWO KABUPATEN NIAS**

NO	NAMA DESA	LUAS (HA)	PERSEKUTUAN LAMBA					JUMLAH PENDUDUK		MATA PENCAHARIAN					JUMLAH LAKSANA		JUMLAH RUMAH	
			SIWA	PERSEKUTUAN	PERSEKUTUAN	SIWA	SIWA	L	P	SIWA	SIWA	SIWA	SIWA	SIWA	SIWA	SIWA	SIWA	
1	BARUZO I	125	66	18	17	63	132	133	133	1	1	133	1	1	1	1	1	
2	BARUZO II	228	179	17	85	85	328	333	333	3	3	333	3	3	3	3	3	
3	BARUZO III	329	46	323	5	1	96	107	103	1	1	103	1	1	1	1	1	
JUMLAH		682	291	218	26	2	556	573	569	5	5	569	5	5	5	5	5	

KECAMATAN IDANOGAWO
KABUPATEN NIAS
Desa BaruZO

Gambar 1. Profil Desa Baruzo



Gambar 2. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Baruzo



Gambar 3. Wawancara Peneliti dengan Bapak Kepala Desa



Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Bapak Sekrtaris Desa



Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Bapak Kasi Pemerintah



Gambar 6. Wawancara Peneliti dengan Bapak Kaur Keuangan



Gambar 7. Wawancara Peneliti dengan Ibu Kasi Kesejahteraan Pelestarian Adat dan Budaya



Gambar 8. Foto Bersama dengan Perangkat Desa Baruzo